

5.984 Pelamar Perebutkan 591 Formasi CPNS di Kota Bogor

BOGOR (IM)- Pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sudah berakhir. Ada 5.984 pendaftar yang memasukkan lamarannya, dan akan diseleksi hanya 591 orang yang akan diterima sebagian besar tenaga kesehatan dan pendidikan.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, jumlah pendaftar CPNS yang terdiri dari ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mencapai 5.984 orang. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, Taufik mengatakan, proses pendaftaran CPNS dan calon PPPK tahun 2021 sudah berakhir.

Penutupan pendaftaran, kata Taufik, lebih lama karena ada penyesuaian jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon ASN yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Nomor N6201/B-KS.04/01/SD/K/2021. Surat BKN ini tentang memberikan kesempatan yang lebih luas pada masyarakat untuk mengikuti seleksi ASN.

"Dengan adanya penyesuaian tersebut, pengumuman hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 2-3 Agustus, dengan kesempatan masa sanggah diberikan selama tiga hari yakni 4-6 Agustus," kata Taufik, Jumat (30/7).

Selanjutnya, kata Taufik, tahapan jawab sanggah diumumkan pada 4-13 Agustus dilanjutkan dengan pengumuman pascasanggah yang akan dilakukan pada 15 Agustus 2021.

Sedangkan untuk PPPK guru akan disampaikan langsung oleh Kemdikbudristek pada Agustus sampai Desember. "Pemkot Bogor juga mengeluarkan pengumuman melalui surat wali kota dengan Nomor 800/3602-BKPSDM/2021 tentang perpanjangan masa pendaftaran dan penyesuaian jadwal," kata Taufik.

Menurutnya, Pemkot Bogor mendapat kuota 591 formasi dari 600 formasi yang diusulkan ke pemerintah. Rinciannya adalah 257 formasi untuk CPNS dan 334 untuk PPPK. Untuk tenaga kesehatan sebanyak 211 orang dan tenaga teknis sebanyak 46 orang. Mulai dari dokter, perawat hingga bidan, yang akan ditempatkan di berbagai puskesmas dan RSUD di Kota Bogor. Dari total CPNS yang tersedia, sambung dia, ada alokasi lima formasi untuk peserta difabel dan tiga formasi untuk peserta cum laude.

Sedangkan untuk PPPK, seluruhnya untuk formasi tenaga pendidik berjumlah 334 formasi. Mulai dari guru kelas, guru agama Islam, guru pendidikan jasmani (perjas), guru konseling hingga guru TTK, yang akan ditempatkan di berbagai sekolah tingkat SD dan SMP. ● **gio**

Selama Jadi Wabup, Hengky Kurniawan tak Dilibatkan Urusan Pemda KBB

BANDUNG BARAT (IM)- Pdt Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan mengaku sejak 2,5 tahun mendampingi Bupati Bandung Barat non aktif, Aa Umbara Sutisna, ia sama sekali tak pernah dilibatkan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Saat pandemi Covid-19 melanda sejak awal tahun 2020 lalu, Hengky menyebut namanya tak ada di SK Satgas Covid-19 Bandung Barat. Apalagi sampai terlibat melakukan pembahasan pengadaan hingga penyalurannya.

"Jadi benar-benar tidak dilibatkan dalam Satgas Covid-19 KBB. Dalam SK tidak ada, terus rapat dengan Satgas KBB, Sekda, dan Pansus DPRD juga tidak pernah. Jadi lebih banyak kegiatan di luar, sementara Pemda KBB dengan APBD-nya," ungkap Hengky saat dihubungi, Jumat (30/7).

Keterangan itu jugalah yang disampaikan Hengky terhadap penyidik KPK yang memeriksanya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat (KBB) tahun 2020, di Kantor KPWK Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Jakarta, Selasa (27/7) kemarin.

Dalam perkara tersebut nama Bupati Bandung Barat non aktif Aa Umbara Sutisna terseret hing-

ga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Hengky mengatakan Aa Umbara Sutisna yang merupakan partnerinya saat itu, sama sekali tak pernah mengajarkannya membahas skema pengadaan bansos Covid-19 untuk kemudian disalurkan pada pencemirannya.

"Sejak awal tidak diajak membahas bansos. Jadi intinya semua kegiatan pembagian tugas di pemerintahannya, mulai dari pembahasan APBD dan bansos tidak dilibatkan. Tidak pernah diundang apalagi duduk bersama membahas program dan kebijakan di KBB," terang Hengky.

Namun, ia mengetahui di satu waktu penyaluran bansos tersebut menimbulkan masalah lantaran item yang diterima warga dalam kondisi tak layak konsumsi. "Saya cuma tahu data penerimaannya dari Dinsos KBB. Setahu saya ada sedikit masalah saat pendistribusian di desa-desa, yaitu tidak sesuai dengan permintaan sampai muncul kasus ayam busuk itu kan," tegas Hengky.

Hengky mengatakan akan bersikap kooperatif terhadap proses penyidikan kasus korupsi yang hingga saat ini masih dilakukan oleh penyidik KPK termasuk pemeriksaan terhadap dirinya. "Di panggilan pertama kemarin pun saya hadir dan pastinya akan kooperatif kedepannya," ujar Hengky. ● **pur**

8 Nusantara



SATPOL PP BERSIHKAN ATRIBUT AKSI MALIOBORO BERKABUNG

Satpol PP D.I Yogyakarta mencopot bendera putih yang dipasang Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro usai aksi "Malioboro Berkabung" di Jalan Malioboro, Yogyakarta, Jumat (30/7). Pedagang PKL Malioboro memasang sejumlah bendera putih beberapa saat di sepanjang Jalan Malioboro sebagai simbol PKL yang tengah berkabung menyusul kondisi sosial dan ekonomi PKL Malioboro yang pahit dan sakit akibat pandemi COVID-19 khususnya masa PPKM.

WARGA KHAWATIR TIDAK BISA MEMANFAATKANNYA

KIS-PBI Tidak Aktif, Dewan Sebut Dinsos Tidak Peka

Anggota DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya mengaku kesal dengan lemahnya pelayanan di bidang kesehatan. Ini sangat merugikan masyarakat, saat akan digunakan yang sifatnya darurat, kartu KIS-PBI nya malah tidak aktif, katanya.

BOGOR (IM)- Fasilitas Kartu Indonesia Sehat - Penerima Bantuan Iuran (KIS - PBI) yang diberikan pemerintah

nyatanya tidak dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat. Salah satunya dialami Nuryati warga Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah.

Nuryati memiliki KIS-PBI tetapi tidak bisa merasakan jaminan kesehatan tersebut, karena kartu KIS - PBI yang dimilikinya dalam status tidak aktif.

"Kartunya (KIS-PBI) tidak aktif, saya diarahkan ke kantor BPJS, pas sudah sampai sana hanya melay-

ani yang mandiri, saya ke kelurahan lagi, kemudian dikasih link buat cek status, tapi pelayanan BPJS khususnya PBI sedang mengalami gangguan," ungkap Nuryati kepada wartawan, Jumat (30/7).

Nuryati melanjutkan, dirinya yang tengah hamil lima bulan mengaku khawatir dengan kondisi seperti ini.

"Saya takut pas saya mau persalinan, kartu KIS-nya belum aktif sementara sistemnya belum selesai diperbaiki. Jadi saya mau urus-urus ini dari awal biar ga ribet nantinya,"

terangnya.

Nuryati menerangkan, di usianya yang menginjak 41 tahun sangat rentan menghadapi proses persalinan.

"Ya, saya yang udah 40an rentan untuk melahirkan normal, jadi kalau caesar saya ngga terlalu bingung soal biaya karena KIS-PBI nya aktif," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PDI Perjuangan, Atty Somaddikarya mengaku kesal dengan lemahnya pelayanan di bidang kesehatan.

"Ini sangat merugikan masyarakat, saat akan digunakan yang sifatnya darurat, kartu KIS-PBI nya malah tidak aktif. Walaupun aplikasinya diganti, kenapa tidak disosialisasikan?," terangnya.

Atty menambahkan, terus kalau web service rusak yang mau pake kartu harus nunggu betul dulu?

"Ya, mau sampai kapan? Ini menjadi kerugian bagi masyarakat peserta KIS-PBI," terang Atty yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Bogor.

Atty juga mengatakan, seharusnya ada solusi ketika sistem mengalami gangguan. Ini jangkakan sekadar diaktifkan yang daftar baru tidak bisa dilayani, jika memang rusak harusnya ada solusi, agar pelayanan tetap berjalan.

"Dalam posisi sulit seperti sekarang harusnya memberi pelayanan yg mudah dan cepat. Kerusakan seharusnya segera diperbaiki. Seharusnya, apa yang sudah diberikan pemerintah dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat ketika dibutuhkan terlebih dalam sektor kesehatan," tegasnya.

Atty mengatakan heran, dengan Kartu KIS-PBI yang tidak aktif karena biasanya yang tidak aktif yang mandiri karena ada tunggakan, kalau yang PBI tidak aktif aneh. Seharusnya tidak ada alasan tidak aktif karena sudah dibayarkan dan dianggarkan setiap tahun oleh APBD.

"Secara akal sehat kalau PBI tidak aktif apa kendalanya?, jadi pertanyaannya tidak bayarkan iurannya? Jika masyarakat peserta KIS-PBI dalam kondisi darurat di RS

masa sih harus bayar dengan status pasien umum!," jelasnya.

Sementara, Kepala BPJS Kota Bogor, Fahrurrozi mengungkapkan bahwa proses maintenance untuk keamanan data peserta masih belum selesai, hal itu merupakan bentuk antisipasi BPJS untuk menjaga kebocoran data peserta.

"Karena sistem solid Dinsos Kota Bogor langsung masuk mengakses ke database tersebut. Sedangkan kita kejar kapan estimasi waktu selesai nya?,"

Ia melanjutkan, solusi sementara sudah disampaikan ke Dinsos Kota Bogor.

"Untuk sementara melakukan pendaftaran secara manual sampai sistem bisa diakses kembali. Saat ini dinsos rumuskan langkah-langkahnya," jelasnya lewat pesan singkat whatsapp.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, H. Fahrudin mengatakan, aplikasinya saja yang diganti, lainnya tetap on. "Takutnya ada yang tidak aktif, bisa menghubungi bapak Okto di Dinsos," singkatnya. ● **gio**



ISI ULANG Oksigen GRATIS

Pekerja mengatur tabung oksigen untuk pengisian ulang oksigen gratis di UD Berkah Oksigen, Depok, Jawa Barat, Jumat (30/7). Yayasan Khadimul Madani bekerja sama dengan UD Berkah Oksigen menyelenggarakan pengisian ulang tabung oksigen gratis setiap hari jumat pukul 08.30 WIB hingga 17.00 WIB untuk wilayah Kota Depok.

Pemkot Bandung Kaji Kebijakan Dine In di Resto dan Kafe

BANDUNG (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sedang mengkaji kebijakan mengizinkan dine in atau makan di tempat di restoran maupun di kafe pasca pemberlakuan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4. Aktivitas dine in saat ini di Kota Bandung masih tidak diperbolehkan.

Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan pihaknya bersama Kapolrestabes Bandung memantau simulasi penerapan dine in dan pemantauan PPKM level 4 di salah satu restoran yang berada di Kota Bandung. Kebijakan dine in dapat dilakukan jika angka penyebaran Covid-19 terus menurun.

"Kita juga harus mempersiapkan sekarang (simulasi), skor kita 1,78 sedikit lagi bisa ke level tiga. Kalau ternyata minggu depan regulasi kita level tiga udah ada kelonggaran-kelonggaran, kita lihat aja," ujarnya di sela-sela meninjau simulasi, Jumat (30/7).

Yana melihat saat simulasi yang dilakukan terdapat infrastruktur yang menunjang pelaksanaan protokol kesehatan seperti bilik desinfektan, seluruh karyawan telah divaksin serta kapasitas yang ada hanya 25 persen. Selain itu, tiap resto

dan kafe harus memiliki satuan petugas (satgas).

Ia mengatakan, dengan kesediaan seperti itu maka diharapkan pengunjung dapat merasa aman dan nyaman saat makan. Selain itu, terdapat petugas yang mengingatkan dan melakukan pengawasan. "Saya lihat udah (siap)," katanya.

Ia melanjutkan, simulasi dine in di resto dilakukan sebagai respon terhadap aspirasi asosiasi restoran dan kafe di Kota Bandung yang terdampak dan berencana mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Namun saat ini berdasarkan regulasi dine in belum diperbolehkan.

"Kita lihat kesiapan mereka, kalau ternyata minggu depan mudah-mudahan berdoa kita lihat kurva penyebaran Covid-19 cenderung turun ya makanya skor risiko udah 1.78 kurang 0,02 aja kita udah turun level ke level tiga tentu butuh persiapan (simulasi) jangan sampai kaget," katanya.

Yana menambahkan, saat ini ketersediaan tempat tidur di rumah sakit bagi pasien Covid-19 sudah turun mencapai 64 persen dan kasus penyebaran Covid-19 mengalami penurunan. Ia berharap agar tren positif tersebut terus berkembang. ● **pur**

Ini Strategi Ade Yasin Tangani Pandemi Covid-19

CIBINONG (IM)- Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin menyampaikan strategi penanganan Covid-19 di Kabupaten Bogor. Ade Yasin menjelaskan, ada lima strategi penanganan yang dilakukan Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor.

Hal itu disampaikan dalam Forum Nasional "Kajian Operasional Membangun Kepemimpinan Kolaboratif dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19" secara virtual di Pendopo Bupati, Cibinong, Kamis (29/7) kemarin.

Ade Yasin menyebutkan, strategi pertama yakni menyelamatkan seluruh masyarakat Bogor yang terancam Covid-19. Salah satunya dengan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan.

"Kami juga membentuk kampung siaga dan kampung tangguh Covid, melaksanakan penegakan disiplin melaksanakan pembatasan dan pengamatan, meningkatkan tracking atau tracing, dan percepatan

vaksin. Kami mengoptimalkan 3.975 kampung dan RW siaga," jelas dia.

Selanjutnya, Ade Yasin menyampaikan, Satgas Covid-19 menangani masyarakat yang terkonfirmasi positif dengan status orang tanpa gejala (OTG). Caranya yakni dengan mendirikan pusat isolasi desa, pusat isolasi kecamatan dan pusat isolasi kabupaten, serta membentuk Tim Bogor Gercep yang membantu membagikan makanan bagi warga yang isoman.

Sementara itu, sambung dia, bagi warga yang terpapar Covid-19 dengan gejala, pihaknya membuat rumah sakit Covid sebanyak 29 unit. Juga menambah ruang ICU, tempat tidur isolasi, ICU dan Velbed untuk antrian ICU, mendirikan Posko serta Satgas oksigen. "Saya juga instruksikan kepada seluruh kepala desa dan lurah untuk untuk mengoptimalkan layanan kedaruratan. Setiap desa harus mengaktifkan call

center siaga dan mobil siaga," ucap Ade Yasin.

Lebih lanjut, Ade Yasin menuturkan, untuk menangani masyarakat yang meninggal akibat Covid-19 baik di rumah sakit atau di rumah, dia telah membentuk Tim Pemulasaran jenazah. Tim Pemulasaran jenazah terdiri dari Linmas, Amil, TNI dan Polri.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor juga telah menambah Taman Pemakaman Umum (TPU) khusus Covid. Juga membentuk tim negosiasi untuk pemakaman sesuai protokol kesehatan, serta menambah ketersediaan peti jenazah.

"Terakhir, menangani dampak Covid-19 yakni dampak sosial dan pemulihan ekonomi. Kami juga melaksanakan percepatan vaksinasi di Kabupaten Bogor. Saat ini sedang berjalan vaksinasi massal serentak di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor dua kali seminggu," jelasnya. ● **gio**



UPAYA PENGEMBANGAN WIRUSAHA PETANI MUDA

Sejumlah siswa SMK 1 Cikampek Jurusan Agribisnis Tanaman merawat tanaman sorgum di lahan pertanian Desa Pucung, Kotabaru, Karawang, Jawa Barat, Jumat (30/7). SMKN 1 Cikampek bekerja sama dengan Koperasi Sangga Buana Lestari mengembangkan sektor pertanian melalui edukasi, pembudi dayaan dan proses produksi hingga penjualan tanaman Sorgum sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan wirausaha petani muda.

INGIN CAPAI HERD IMMUNITY

Bupati Bogor Targetkan 8.575 Sasaran Vaksinasi di Setiap Kecamatan

CIBINONG (IM)- Bupati Bogor, Ade Yasin memerintahkan 40 camat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan seluruh stakeholder untuk mempercepat vaksinasi bagi masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Hal itu, bertujuan untuk mencapai herd immunity di Kabupaten Bogor menjadi lebih cepat. "Saat ini, kita sedang fokus pada pencapaian target vaksinasi minimal 20 persen dari jumlah penduduk pada awal Agustus. Program vaksinasi massal di tingkat Kecamatan yang telah berjalan dengan jumlah minimal 2.000 perkegiatan atau 4.000 perminggu sangat efektif menambah jumlah sasaran, bahkan sampai tanggal 29 Juli 2021 sudah mencapai 740.803 sasaran," ujar Ade Yasin dalam Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual melalui zoom

meeting bersama camat se-Kabupaten Bogor tentang percepatan vaksinasi Covid-19, Jumat (30/7).

Ade Yasin menambahkan, untuk mencapai Herd Immunity Satgas Nasional menargetkan Kabupaten Bogor melaksanakan vaksinasi sebanyak 49.000 dosis setiap hari mulai bulan Agustus. "Sehingga mulai Agustus kita akan menambahkan target capaian di setiap kecamatan perminggunya sebanyak 8.575 orang," pungkas Ade Yasin.

"Program vaksin massal di tingkat kecamatan yang telah berjalan selama ini setiap hari Senin dan Rabu dengan jumlah minimal 2.000 per kegiatan atau 4.000 per minggu sangat efektif menambah jumlah sasaran, bahkan sampai tanggal 29 Juli 2021 sudah mencapai 740.803," ungkap Ade. ● **gio**

10 Ribu Kendaraan di Kota Bogor Diputar Balik Setiap Harinya

BOGOR (IM)- Puluhan ribu kendaraan diputar balik setiap harinya saat aturan ganjil genap diterapkan di wilayah Kota Bogor. Jumlah itu terhitung dari 8 titik check point atau pos penyekatan yang tersebar dan beroperasi selama 24 jam.

"Jadi hasil kami di lapangan rata-rata dalam satu hari itu bisa mencapai sekitar 8.000-10.000 kendaraan yang kita putar balik karena kegiatan ini dilaksanakan di 8 titik selama 24 jam," kata Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo, Jumat (30/8).

Selama ganjil genap, lanjut Susatyo, beberapa area yang biasanya padat kini terlihat sudah berkurang. Pasalnya, kendaraan yang akan masuk ke Kota Bogor sudah disleksikan sesuai dengan pelat nomornya.

"Alhamdulillah memang area-area yang biasanya cukup padat itu sudah berkurang. Sekali lagi ini adalah gerakan disiplin masyarakat

untuk menahan diri satu hari, jadi kami membantu agar masyarakat memilah hari untuk keluar rumah," ungkap Susatyo.

Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan monitoring terhadap tempat-tempat yang dianggap rawan kerumunan seperti pasar. Sehingga, diharapkan menurunnya mobilitas juga dapat menekan angka kasus covid-19 khususnya di Kota Bogor.

"Dalam seminggu ini di jalanan di pusat pusat perdagangan pasar tradisional tidak terjadi kepadatan dan masyarakat Kota Bogor bisa disiplin sehingga kita berharap perkembangan angka positif menurun. Kota Bogor sempat mencapai empat ratus sekian sekarang berada di angka 200-an," tutupnya.

Seperti diketahui, aturan ganjil genap di wilayah Kota Bogor diperpanjang selama sepekan sejak 26 Juli 2021. Perpanjangan ganjil genap karena berdasarkan data efektif menekan mobilitas. ● **gio**